BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Obat merupakan bahan atau campuran bahan termasuk produk biologi yang ditujukan untuk mempengaruhi keadaan patologi untuk upaya penepatan diagnostik, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatandan konsentrasi pada manusia. Bahan aktif yang terkandung mmiliki mekanisme kerja dan sifat fisika kimia yang berbeda-beda, dan setiap obat memiliki karakteristik tersendiri (Waluyo, dkk. 2015). Obat merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga obat tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas ekonomi semata. Selain itu, obat merupakan komponen esensial pada pelayanan kesehatan, sehingga Kementerian Kesehatan perlu membentuk Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Direktorat Jenderal ini mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan. Berdasarkan pentingnya obat tersebut dalam bidang kesehatan maka obat perlu dikelola dengan baik (Waluyo, dkk. 2015).

Obat tidak boleh dianggap sebagai keperluan komoditas ekonomi semata karena obat merupakan kebutuhan pokok manusia. Selain itu dalam pelayanan kesehatan obat merupakan komponen esensial, sehingga Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan alat kesehatan ini perlu dibentuk oleh Dinas Kesehatan. Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal ini yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan (Waluyo, dkk. 2015).

Obat dan perbekalan kesehatan merupakan komponen yang tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Akses terhadap obat dan perbekalan kesehatan terutama obat esensial merupakan salah satu hak asasi manusia, dengan demikian penyediaan obat esensial juga merupakan kewajiban bagi

pemerintah untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu hal penting dalam pelayanan kesehatan adalah pengelolaan obat. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota adalah tempat dimana semua obat yang datang disimpan untuk didistribusikan ke puskesmas. Penyimpanan dan distribusi merupakan bagian dalam fungsi pengelolaan obat yang penting guna menjamin mutu obat yang akan digunakan untuk pelayanan kesehatan (Pramukantoro & Sunarti. 2018).

Pengelolaan obat ialah pelaksanaan manajemen obat. Manajemen pengelolaan obat merupakan rangkaian siklus kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengangaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan, penghapusan dan pengawasan (Waluyo, dkk. 2015). Pengelolaan obat yang tidak efisien menyebabkan banyaknya obat menumpuk akibat ketidaksesuaian perencanaan, berkurangnya ketersediaan, serta terjadikekosongan obat, sehingga dapat berdampak terhadap efisiensi penggunaan anggaran/biaya obat di tingkat kabupaten/kota. Permasalahan yang sering dihadapi Instalasi Farmasi dalam perencanaan obat yaitu terlalu banyak dalam membeli, pembelian obat yang tidak diperlukan, kurang Memperhitungkan umur obat sehingga obat banyak yang kedaluwarsa (Pramukantoro & Sunarti. 2018).

Dinas kesehatan merupakan unsur pelaksanaan bidang kesehatan yang dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang kesehatan berdasarkan azas otonom dan tugas pembantuan khususnya di kotanya. Segala bentuk pengawasan, pembinaan dan perijinan Rumah Sakit Daerah, Puskesmas, Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesehatan, dan lembaga-lembaga pelayanan kesehatan swasta ditangani oleh Dinas Kesehatan (Walujo, dkk. 2018). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengelola Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten/ Kota memiliki tugas melaksanakan

pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan satu pintu (*one gate policy*). Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan obat terutama obat program, yaitu terjadinya kekosongan obat, obat berlebih dan obat kadaluarsa. Hal ini dapat mengganggu upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan dan keterjangkauan obat serta dapat meningkatkan prevalensi penyakit menular (Boku, dkk. 2019).

Mengingat pentingnya pengelolaan obat program ini dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu, oleh karena itu sangat perlu dilakukan evaluasi pengelolaan obat program di dinas kesehatan, agar dapat mengetahui permasalahan yang ada dan dapat memperbaiki guna meningkatkan pelayanan kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana penyimpanan obat program di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan?

1.2.2 Bagaimana distribusi obat program di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan pengangkatan rumusan masalah tersebut ada beberapa tujuan yang ingin dicapai.

1.3.1 Mengetahui penyimpanan obat program di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan.

1.3.2 Mengetahui distribusi obat program di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan**.**

1.4 Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari Laporan Tugas Akhir ini yaitu:

1.4.1 Mahasiswa mengetahui penyimpanan dan distribusi obat program yang efektif dan efisien di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan.

1.4.2 Dapat mengevaluasi penyimpanan dan distribusi obat program di Dinas Kesehatan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar.